

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dellyana. Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 32.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kartasapoetra Misdayanti. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, 2011, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta.
- Lukman Santoso As. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Nomensen Sinamo. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yunasril Ali. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Walikota Padang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Tahun Pelajaran 2020/2021

Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru

C. Website

<https://nusadaily.com/nusantara/dprd-sekolah-di-padang-mulai-abai-penerapan-prokes.html>

<https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal>

<https://news.detik.com/berita/d-4983197/fkm-ui-ungkap-corona-masuk-ri-sejak-januari-pemerintah-kenapa-baru-bilang>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/>

<https://satpolpp.bantulkab.go.id/hal/profil-dan-sejarah>

<http://scholar.unand.ac.id/37162/2/BAB%20I%20%28Pendahuluan%29.pdf>

<https://sushifm.co.id/penerapan-protokol-kesehatan-di-sekolah/>

<https://retizen.republika.co.id/posts/13426/harapan-dan-upaya-pemerintah-serta-masyarakat-terhadap-pandemi-covid-19>

<https://dinkes.padang.go.id/>

<https://padangkota.bps.go.id>

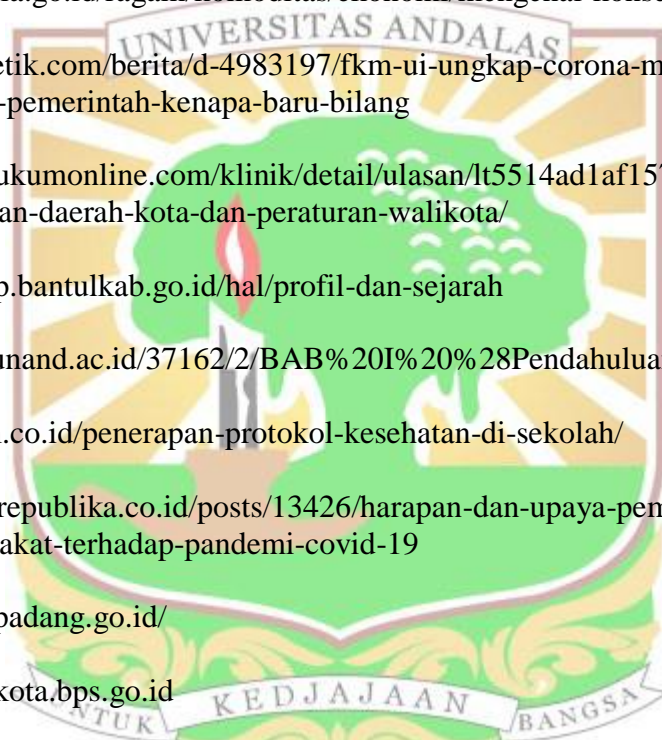
<https://web.archive.org/web/20200611155702/https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/90729/update-dua-warga-padang-positif-corona-salah-satunya-petugas-medis#top>

<https://papua.tribunnews.com/2020/04/11/cerita-pasien-corona-yang-sembuh-di-sumbar-terharu-disemangati-tenaga-medis-hingga-cleaning-service>

<https://news.detik.com/berita/d-4954434/5-warga-sumbar-positif-corona-dirawat-di-padang-dan-bukittinggi>

<http://corona.padang.go.id/>

<https://disdik.padang.go.id/>



D. Jurnal

Ardika Nurfurqon, "*Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*", Jurnal Yustika, Vol.23 No.01, 2020.

Diyar Ginanjar, "*Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19*", Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. 13, No.1, 2020.

Muhammad Suharjono, "*Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*", DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, 2014.

Muh Hasrul, "*Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*", Amanna Gappa, Vol. 25 No.2, 2017.

Nurul Hidayah Nasution, Et. Al, "*Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidimpuan*", Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia, Vol. 16, No.1, 2021.

Syafrida dan Ralang Hartati, "*Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia*", Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol.7, No.6, 2020.

Roni Ekha Putera, "*Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian "Millennium Development Goals"*", Jurnal Mimbar, Vol. 31, No.1, Hlm. 229.

